

PERAN KEMARITIMAN INDONESIA DI MATA DUNIA

Harries Arizona Ismail

Universitas AKI

E-mail : harries.arizona@unaki.ac.id

Erawati Kartika

Universitas AKI

E-mail : erawati.kartika@unaki.ac.id

ABSTRACT

The purpose of choosing this study is to examine Indonesia's vision as a world maritime axis. This vision is very important because it is nominated by President Joko Widodo in the speech on the official opening of the 2018 Our Ocean Conference (OCC) event in Nusa Dua, Bali, Monday (10/29/2018). This vision is becoming more important since Indonesia still encountered by maritime problems, such as security and financial issues, which are suspected to be attaching that vision. This study is using heuristic and eclectic methods. This is a descriptive qualitative philosophical study that will be centered on the President's speech and the reporting of national newspapers on maritime issues, which have the opportunity to raise nation and state ethical issues. Realizing that Indonesia's vision as a global maritime axis must be coming true in order to format Indonesian roles on maritime subject in the eye of the world.

Keywords : *Maritime; Indonesia world maritime axis, Our Ocean Conference heuristic, Eclectic, Philosophical study*

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi ini begitu penting karena dipatokan oleh bapak Presiden Joko Widodo dalam rangka pembukaan resmi ajang *Our Ocean Conference* (OCC) 2018 di Nusa Dua, Bali, Senin (29/10/2018). Visi ini semakin penting ketika masih banyak dijumpai problem kelautan kita, seperti masalah keamanan dan perekonomian yang ditengarai akan melemahkan visi tersebut. Melalui metode heuristik dan eklektik, kajian filosofis berjenis deskriptif kualitatif ini akan berpusat pada pidato Presiden dan pemberitaan surat kabar nasional tentang problem kemaritiman, yang berpeluang memunculkan problem etis berbangsa dan bernegara. Hasilnya, visi Indonesia sebagai poros maritim dunia harus tetap diwujudkan demi terwujudnya peran kemaritiman Indonesia di mata dunia.

Kata kunci : *Kemaritiman, Indonesia poros maritim dunia, Our Ocean Conference, Heuristik, Eklektik, Kajian filosofis*

Pendahuluan

Pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka pembukaan resmi ajang *Our Ocean Conference* (OCC) ke-5 di Nusa Dua, Bali, tanggal 29 Oktober 2018 menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki peranan penting di mata dunia dalam bidang maritim. Dalam pidatonya presiden menegaskan bahwa Indonesia adalah negara bahari di mana wilayah Indonesia sebagian besar terdiri dari laut dan dengan laut pulalah telah memberikan jutaan manusia di dunia ini sebuah kehidupan. Kurang lebih 90% dari total volume perdagangan dunia dilakukan melalui jalur laut dan sekitar 61% dari minyak dunia juga didistribusikan melalui laut. Diungkapkan pula bahwa nilai potensi dari kekayaan laut mencapai angka US\$ 24 triliun. “Demikianlah gambaran penting mengenai laut bagi kehidupan dan masa depan umat manusia,” terang Presiden. Terlepas dari pentingnya mengenai fungsi kelautan, kejahatan lautpun juga semakin meningkat. Seperti perompakan, penyelundupan obat terlarang, perdagangan manusia hingga penangkapan ikan secara ilegal. Belum lagi masalah lingkungan hidup di kawasan laut. Mulai dari masalah sampah plastik, polusi air, pemanasan suhu dan naiknya permukaan air laut.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum merasakan peran signifikan dari potensi maritim yang dimiliki dengan ditandai belum adanya pengelolaan potensi maritim Indonesia secara maksimal. Dengan beragamnya potensi maritim Indonesia, antara lain industri bioteknologi kelautan, perairan dalam, wisata bahari, energi kelautan, mineral laut, pertahanan, pelayaran serta industri maritim, sebenarnya dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan alam khususnya laut di Indonesia masih banyak yang dikuasai oleh pihak asing dan mementingkan kepentingan diri sendiri.

Dalam hal ini, peran Pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk bisa selalu menjaga, mempertahankan dan mengolah kekayaan serta potensi maritim di Indonesia. Oleh sebab itu dalam pengelolaannya untuk sumber daya alam laut ini bukanlah hal yang mudah karena dimulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, modernisasi teknologi serta pendanaan yang berkesinambungan dalam APBN negara agar bisa memberi manfaat dalam bidang ekonomi bagi negara dan juga bagi masyarakat. Diharapkan juga peran swasta untuk mendukung jalannya pemberdayaan laut ini, supaya program-program ini tidak hanya bergantung pada dana APBN saja. Seperti yang pernah disampaikan oleh Alfred Thayer Mahan mengenai teori yang pernah dikemukakan dimana persyaratan yang harus dipenuhi untuk membangun kekuatan maritim, adalah posisi dan kondisi geografi, luas wilayah, jumlah dan karakter penduduk, serta yang paling penting adalah karakter pemerintahannya.

Dari sisi pertahanan, pemerintah perlu segera menyelesaikan percepatan batas wilayah laut agar dapat memberikan kepastian atas batas wilayah negara serta dapat memperlancar hubungan bilateral antara negara yang berbatasan, serta mendorong kerja sama kedua negara yang berbatasan di berbagai bidang termasuk dalam pengelolaan kawasan perbatasan, misal terkait dengan pelayaran, kelautan serta perikanan. Seperti diketahui, Indonesia memiliki perbatasan maritim dengan 10 negara yaitu dengan India (Landas Kontinen, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)), Thailand (Landas Kontinen, ZEE), Malaysia (Laut Wilayah, ZEE, Landas Kontinen), Singapura (Laut Wilayah), Vietnam (Landas Kontinen, ZEE), Filipina (ZEE, Landas Kontinen), Palau (ZEE, Landas Kontinen), Papua Nugini (ZEE, Landas Kontinen), Timor Leste (Laut Wilayah, Landas Kontinen, ZEE) dan Australia (ZEE, Landas Kontinen). Dari sejumlah perbatasan itu, Indonesia telah menyelesaikan sebagian penetapan batas maritim dengan India (Landas Kontinen), Thailand (Landas Kontinen), Malaysia (sebagian Laut Wilayah, Landas Kontinen), Singapura (sebagian Laut Wilayah), Vietnam (Landas Kontinen), Filipina (ZEE),

Papua Nugini (ZEE, Landas Kontinen) dan Australia (ZEE, Landas Kontinen).

Berbagai upaya lainnya tetap terus dilaksanakan untuk menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia, antara lain seperti penyempurnaan RUU Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, penyelarasan sistem pendidikan serta pelatihan kemaritiman selain itu juga mengenai penguasaan kapasitas industri pertahanan khususnya industri maritim, modernisasi armada perikanan, penguatan armada pelayaran rakyat dan pelayaran nasional, pemantapan pengelolaan pemanfaatan laut melalui penataan ruang wilayah laut, peningkatan litbang kemaritiman, dan diversifikasi sumber energi terbarukan di laut.

Metode Penelitian

Pada penulisan ini, metode yang digunakan adalah studi literatur yang mengkaji berbagai literatur mengenai poros maritim dunia.

Pembahasan

Bagaimana Indonesia dalam menjalankan visinya untuk mencapai perannya sebagai negara poros maritim dunia? Dalam perspektif pertahanan keamanan, memang sejak lama kita sudah ketahui bahwa laut, pesisir, dan sungai merupakan urat nadi yang menjadi kekuatan bangsa ini. Jika dilihat dari sudut pandang geostrategi dan geopolitik, negara Indonesia yang berada pada perlintasan dua benua dan dua samudera, merupakan negara yang termasuk rawan dari sisi politik dan keamanan laut, baik keamanan laut yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional. Perompakan, eksploitasi sumber daya, *illegal fishing*, konflik nelayan dan ancaman *Trans National crimes* di perairan Indonesia masih sering terjadi. Belum lagi masalah pulau-pulau terluar dan perbatasan yang juga menimbulkan persoalan politik, diantaranya adalah tumpang tindih klaim kepemilikan beberapa pulau di perbatasan oleh beberapa negara. Selain itu juga minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, terbatasnya infrastruktur maritim, lemahnya penegakan hukum, menambah semakin rumitnya persoalan.

Persoalan dan kelemahan di atas adalah sesuatu hal yang tidak mudah diatasi karena kompleksitasnya. Maka dari itu, perubahan harus segera dilakukan, dan saat inilah momentum yang tepat untuk memulai perubahan, seiring dengan komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan di sektor maritim dan kelautan. Konsep yang komprehensif dan berkelanjutan ini adalah salah satu langkah yang tepat dalam mendukung visi dan misi pembangunan maritim, yakni sebuah Kebijakan Kelautan Indonesia.

Dilihat dari perspektif hukum bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang pada bagian Lampiran tentang Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025 mengandung visi pembangunan Indonesia yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Misi ketujuh dari pembangunan nasional 2005 – 2025 adalah “Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”. Berdasarkan hal tersebut, pada 20 Februari 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Kebijakan Kelautan Indonesia ini adalah pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian/lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi Poros Maritim Dunia. Dengan demikian UU No. 17/2007 (RPJP Nasional 2005 – 2025) dan Kebijakan Kelautan Indonesia telah memberikan arah bagi pembangunan kemaritiman dan kelautan yang meliputi aspek-aspek yang sangat relevan dengan amanah Pembukaan UUD 1945.

Kebijakan dan UU ini juga telah memberikan identifikasi berbagai permasalahan penting dalam upaya memanfaatkan dan pengelolaan sumber daya kelautan, sehingga mendorong pengambil kebijakan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan menuju pada

unifikasi hukum kemaritiman dan kelautan nasional yang saat ini telah terfragmentasi secara parsial. Hal tersebut merupakan dasar bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang bercita-cita menjadi sebuah Negara Maritim. UU Kelautan juga akan menjadi payung hukum untuk mengatur pemanfaatan laut Indonesia secara komprehensif dan terintegrasi. Bersamaan dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo secara resmi juga memfokuskan betapa pentingnya peran Maritim Indonesia dengan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mengenai kebijakan strategis tersebut, mengingatkan kita mengenai negara Indonesia sebagai negara bahari yang dikelilingi oleh lautan di mana seluruh alur pelayaran dunia akan melalui lautan Indonesia sebagai jalur strategis sehingga harus dapat dimanfaatkan oleh negara Indonesia sebagai pendekatan diplomasi serta menjadikannya negara Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Ide untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Presiden Joko Widodo telah membentuk sebuah kementerian maritim, dimana pembentukannya Kementerian Maritim sebagai salah satu Kementerian di bawah Kabinet Presiden Terpilih Jokowi, dan pembentukannya Kementerian Koordinator Maritim yang membawahi kementerian-kementerian yang berhubungan dengan hal maritim bisa memfokuskan kabinet pada pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kompleksitas permasalahan yang terjadi serta banyaknya kasus yang harus ditangani dalam pembangunan berbasis maritim saat ini menuntut kebijakan lintas sektoral yang efektif.

Dalam mewujudkan poros maritim dunia peran TNI AL sangatlah dibutuhkan, hal ini sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dimana TNI AL mempunyai peran, tugas dan fungsi yang mendukung visi pembangunan nasional. Peran TNI AL dalam hal ini adalah ikut berperan serta dalam usaha menegakkan hukum dan kedaulatan nasional, tugas lainnya adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut ini melalui pembinaan kekuatan potensi maritim yang ada, serta ikut berupaya melaksanakan pertahanan dan pengamanan laut. TNI AL telah melaksanakan operasi dan patroli keamanan laut, baik sendiri maupun terkoordinasi.

Oleh karena itu TNI AL dalam menjalankan perannya di bidang keamanan maritim, TNI AL juga mengamankan segala aktivitas yang berkaitan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Proyeksi dari kekuatan TNI AL dalam bentuk operasi-operasi yang dilaksanakan, merupakan kegiatan pengendalian laut dengan tujuan untuk mengamankan wilayah maritim di Indonesia.

Kehadiran unsur-unsur kekuatan TNI AL di perairan adalah sangat krusial dimana sebagai bentuk pengendalian laut dan penguasaan ruang udara di atasnya disamping itu juga berperan dalam mencegah penggunaan oleh pihak asing atau pihak-pihak yang dapat merugikan negara.

Untuk sarana dan prasarana pengendalian laut berupa kapal, radar pantai, pesawat udara, pelabuhan dengan segala perlengkapannya, serta komunikasi merupakan unsur penting /utama yang harus dimiliki oleh TNI AL dan institusi bidang kelautan. Unsur utama yang paling menentukan dalam keberhasilan pengendalian laut adalah mampu mengawasi, mendeteksi, mengarahkan dan menindak kapal-kapal yang melakukan pelanggaran di laut, terutama pada daerah-daerah rawan. Hal ini berakibat sebagian besar wilayah perairan Indonesia tidak mudah untuk dimonitor, yang menyebabkan banyak sekali terjadi pelanggaran oleh pihak asing, baik kapal perang maupun para pelaku *transnational crime*.

Upaya yang dilakukan untuk menghadapi hal ini diperlukan arah pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yakni kemampuan operasi pengamanan wilayah maritim Indonesia dapat dicapai melalui pembangunan sarana prasarana yang memadai, sehingga baik alut sista, pelabuhan dan infrastruktur pendukungnya dapat mengadakan penyesuaian arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana kelautan. Perbaikan infra struktur maritim yang menunjang seperti adanya pembangunan tol laut sebagai penghubung yang menyediakan pelabuhan utama dengan pelabuhan pengumpan misalnya.

Dalam mewujudkan poros maritim dunia, selanjutnya TNI AL meninjau kembali bentuk-

bentuk kerja sama antar institusi terkait dalam pengamanan maritim, melalui pemetaan tugas dan tanggung jawab dan prosedur serta mekanisme yang perlu dilakukan agar efektif dan efisien pelaksanaan tugas dan hasil yang dicapai. Dalam rangka menjalankan tugas, TNI AL dapat meningkatkan hubungan kerja sama keamanan maritim dengan institusi yang bergerak di bidang kelautan. Kerja sama membangun sistem pengamanan dan penegakan hukum dengan membangun sinergis antar institusi terkait, sehingga keamanan di perairan yurisdiksi nasional dapat tercapai dengan baik. Terpadunya sistem pengawasan, pemantauan atau pengamatan aktivitas kelautan di seluruh wilayah Indonesia, sangat mendukung ketepatan, kecepatan pencegahan dan penindakan terhadap setiap adanya pelanggaran di laut.

Dalam menunjang peran TNI AL dalam mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim Dunia maka perlu dilakukan diplomasi maritim dimana diplomasi ini merupakan salah satu bentuk diplomasi militer yang diperankan oleh TNI AL. Diharapkan dengan adanya diplomasi maritim dapat menumbuhkan saling percaya antar negara. Dimana berbagai kegiatan yang dilaksanakan mampu mengurangi intensitas pelanggaran di laut yurisdiksi nasional Indonesia seperti pelanggaran kedaulatan, pencurian ikan, sengketa wilayah, perompakan dan pencemaran laut.

Oleh sebab itu dalam pengelolaan laut Indonesia harus melibatkan banyak lembaga, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI AL, dan Polri. Dengan banyaknya lembaga yang berkecimpung di laut diharapkan menjadi peluang untuk memudahkan negara Indonesia dalam mewujudkan cita-cita sebagai poros maritim dunia. Dari sisi sumber daya manusia Kementerian Perhubungan melakukan reformasi mengenai fungsi direktorat jenderal perhubungan laut dengan memberikan kesempatan bagi para tenaga muda untuk berkontribusi.

Pentingnya eksistensi Kementerian Maritim adalah agar bisa mengintegrasikan persoalan-persoalan maritim serta memberikan solusinya dan menyosialisasikan kepada masyarakat di daerah pesisir Indonesia sebagai pelaksana pertama terhadap hal-hal yang terjadi di lautan Indonesia. Secara umum, Kementerian Koordinator Bidang Maritim tidak hanya fokus menangani persoalan perikanan dan sumber daya maritim, tetapi juga keamanan, batas wilayah laut, bea cukai, serta banyak hal lain yang selama ini telah menjadi tanggung jawab sejumlah kementerian lain. Pembentukan kementerian Maritim, Kementerian Koordinator Maritim, atau hanya dengan penguatan dan efisiensi Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta peningkatan sinergi dengan kementerian terkait maritim lainnya, dibutuhkan komitmen penuh dan kuat dari Pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk melaksanakan kebijakan pembangunan berbasis kelautan sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat di dunia. Peranan teknologi juga menjadi bagian penting dalam kemaritiman dengan melibatkan potensi energi laut seperti perbedaan suhu laut, perbedaan salinitas, ombak dan pasang surut air laut.

Kesimpulan

Visi Bangsa Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan harapan dan sekaligus sebagai wujud "*ocean policy*" di mana visi bangsa Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dipidatoken oleh bapak Presiden Joko Widodo dalam rangka pembukaan resmi ajang *Our Ocean Conference (OCC)* 2018 di Nusa Dua, Bali, tanggal 29 Oktober 2018.

Sebuah visi dan misi yang harus ada pada semua arah institusi negara yang dituangkan dalam bentuk kebijakan kemaritiman dan kelautan dengan implikasi secara ekonomi, politik, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan. Sehingga dalam hal ini sektor maritim dan kelautan menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Hal inilah yang akan kemudian menjadi tugas bersama dari semua komponen bangsa untuk menjawab problem struktural bangsa

yakni kemiskinan, keterbelakangan, dan ketergantungan terhadap negara-negara maju. Pemerintah harus mampu mengelola potensi maritim dan kelautan untuk kepentingan nasional dengan tidak hanya mengandalkan kementerian terkait, namun juga harus membangun keterkaitan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya baik di pusat maupun daerah. Oleh karena itu, TNI AL sebagai bagian dari instansi pemerintahan yang mempunyai domain di laut yang berperan serta dalam mencapai tujuan nasional sesuai arah Kebijakan Kelautan Indonesia. Dengan bersama yakni menyejahterakan bangsa, “*ocean policy*” berupa visi tersebut harus didukung secara etis dan akademis oleh semua komponen bangsa yang merupakan bagian dari NKRI.

Daftar Pustaka

- Anonim (2014), Indonesia Raksasa Maritim:Masih Tertidur Lelap. <http://www.bumn.go.Id / pelindo1 /berita/8386/Indonesia.raksasa.Maritim:.Masih.Tertidur.Lelap>. Diakses 18 Februari 2017
- Aji Sularso (2014), Poros Maritim dan Tol Laut. Majalah Maritim Edisi Oktober 2014. Baggini, Julian. 2013. Making Sense, Filsafat di Balik Headline Berita. (Penerjemah: Nurul Qamariyah). Jakarta: Teraju.
- Begi Hersutanto (2009), Makna Negara Kepulauan. Badan Koordinasi Keamanan Laut. Jakarta. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia dalam Pidato Kenegaraan Pertama pada saat Pelantikan Joko Widodo menjadi Presiden RI.
- Detik.com*. (2015), Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, *Detik.com*, 13/11/2015; 12.54 WIB.
- Kadarisman, Muh. (2015), *Transportation System and Human Need in a Family*, Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik 02 (03): 313-331.
- Kompas (2017), Maritim Masih Butuh Terobosan: Pelarangan Penggunaan Cantang Ditunda, Kompas, 5/5/2017; h.18
- Kompas (2017), Kapal Keruk Asal China Ditangkap, Kompas, 6/7/2017; h. 17. Kompas. 2017. Pemerintah Naikkan Tarif Penyeberangan, Kompas, 6/11/2017; h.17.
- Kompas.com (2014), Jokowi Ingin Kembalikan Kejayaan Sriwijaya Lewat Program Maritim, Kompas. com 14/08/2014; 15.44 WIB.
- Limbong B (2014), Poros Maritim. Jakarta: Pustaka Margaretha. Nono. 2014. Nono Sampono Nyatakan Urgensi Payung Undang-undang Kemaritiman. [http:// metro.bali.com /2014 /08 /27/nono-sampono-nyatakan-urgensi-payung-undang- undang-kemaritiman/](http://metro.bali.com /2014 /08 /27/nono-sampono-nyatakan-urgensi-payung-undang- undang-kemaritiman/) . Diakses terakhir 8 Februari 2017.
- Munandar, Aris (2013), Peran Negara dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Politik dan Masalah Pembangunan 04 (01): 151-162.
- Sitorus, Budi Tulus Irpan Harsono Sitorus, & Subandi (2016), Peningkatan Jaringan Transportasi di Provinsi Kalimantan Timur dalam Mendukung Aksesibilitas Wilayah, Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik 03 (01): 29-39.
- Sulistiono ST, Rochwulaningsih Y. (2013), Contest for Hegemony : *The Dynamics of Inland and Maritime Cultures Relations in the History of Java Island, Indonesia*. Journal of Marine and Island Cultures 2(2): 115–127
- Soekmono (2015), Sejarah Kebudayaan Indonesia. Yogyakarta: Kanisius.

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. Pembangunan kelautan dalam RPJMN 2015-2019. Presentasi dalam Rapat Koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tema: RKP 2015 dan RPJMN2015-2019
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia Rajab Ritonga. 2016. Kesadaran Baru Maritim, Biografi Laksamana TNI Dr. Marsetio. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 25A Amandemen IV
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.